

BAB III

ANALISIS SISTEM SEDANG BERJALAN

Kewenangan pengujian timbangan atau alat ukur barang dari Pemprov Jawa Barat, disambut baik Pemerintah Kota (Pemkot) Depok. UPTD Metrologi Kota Depok, di bawah Dinas Perdagangan dan Perindustrian berwenang dalam memiliki tugas pokok melakukan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), kalibrasi alat ukur serta melaksanakan pengawasan terhadap alat-alat UTTP yang dimiliki pedagang dan pelaku bisnis di wilayahnya. UPTD Metrologi memberikan pelayanan kemetrologian kepada masyarakat untuk memastikan terciptanya masyarakat yang tertib ukur dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen dan produsen telah memiliki gedung sendiri di Jalan Bahagia No 3 A, Kecamatan Sukmajaya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten/Kota harus siap untuk melaksanakan penyelenggaraan dan retribusi pelayanan pengujian UTTP di daerah masing-masing melalui sebuah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah suatu bidang yang bergerak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kantor UPTD Metrologi Kota Depok bernaung di bawah Dinas Perdagangan dan Perindustrian berwenang dalam memiliki tugas pokok melakukan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP), kalibrasi alat ukur serta melaksanakan pengawasan terhadap alat-alat UTTP yang dimiliki pedagang dan pelaku bisnis di wilayahnya. Sebelumnya kewenangan pengujian berada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Akhir tahun 2015 ini, Kota Depok direncanakan sudah memiliki Gedung Kemetrologian serta layanannya, yang berlokasi di wilayah Sukmajaya, Depok. Tetapi baru sejak Juni 2017 dengan kewenangan yang telah dikeluarkan tentang tera ulang timbangan atau alat ukur dari Pemprov Jawa Barat, UPTD Metrologi Kota Depok mulai melayani permintaan tera dan tera ulang di gedung khusus yang dibangun oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Depok di Jalan Bahagia No. 3 A, Kecamatan Sukmajaya. Saat ini Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki masih sangat minim, baru ada 3 orang penera, 1 orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU), 1 orang bendahara, 1 orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kemetrologian dan 1 orang di bagian pelayanan.

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kantor UPTD Metrologi Kota Depok

Berikut ini merupakan uraian pekerjaan dalam Kantor UPTD Metrologi Kota Depok.

Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD dalam bidang pelayanan pengujian alat- alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pelayanan kemetrologian legal lainnya sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Uraian Tugas Kepala UPTD antara lain sebagai berikut.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Uraian Tugas Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut.

Petugas UPTD mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan pengelolaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pelayanan. Uraian Tugas Petugas UPTD adalah sebagai berikut.

Bendahara mempunyai tugas membantu dalam melaksanakan pengelolaan, pengkoordinasian dan pelayanan urusan retribusi. Uraian Tugas Bendahara adalah sebagai berikut.

Berikut merupakan kegiatan yang berlangsung di Kantor UPTD Metrologi Kota Depok yang telah diatur berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Sistem yang sedang berjalan menjelaskan dengan detail bagaimana cara kerja sistem yang sedang berjalan serta masalah-masalah yang ada untuk menjadi landasan usulan dalam membuat perancangan analisis sistem yang sedang berjalan.

Setiap perusahaan atau pelaku bisnis yang berada di Kota Depok akan melakukan permohonan untuk melakukan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya pada kantor UPTD Metrologi Kota Depok, sehingga nantinya bagian Kepala Sub Bagian akan membuat jadwal sekaligus menerbitkan surat tugas yang akan di tanda tangani oleh Kepala UPTD. Dalam surat tugas tersebut ditunjuk dua orang petugas untuk melakukan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Selanjutnya dilakukan pengujian oleh petugas dimana pengujian dilakukan tergantung dari seberapa besar timbangan. Timbangan yang diuji di kantor hanya berupa timbangan-timbangan kecil, contohnya timbangan neraca obat, sedangkan yang akan diuji di lapangan berupa SPBU dan lain sebagainya. Jika peralatan yang diuji tidak memenuhi syarat maka peralatan tersebut harus diperbaiki sehingga menghasilkan hasil yang sesuai dengan standar yang ditentukan. Jika peralatan sudah sesuai dengan standar maka diterbitkan sertifikat yang berlaku selama periode tertentu dan harus dilakukan pengujian kembali jika periode yang ditentukan berakhir.

Namun sebelum sertifikat diterbitkan kepada pelaku usaha, mereka harus membayar uang retribusi terlebih dahulu. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau suatu badan. Bendahara UPTD Metrologi Kota Depok memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengurus keuangan retribusi, membuat Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD), membuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), serta melakukan penyetoran uang retribusi ke bank untuk kepentingan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) dan membuat laporan dari penyetoran uang retribusi tersebut setiap bulannya.

Gambar 3.2 Workflow Sistem Yang Sedang Berjalan

Gambar

3.2 merupakan workflow sistem yang sedang berjalan yang diurutkan dimulai dari Pelaku Usaha, Kepala Sub Bagian Tata Usaha (kasubag), Ka UPT, Petugas, Staff, hingga Bendahara, yang mana setiap peran memiliki aktivitas yang berbeda-beda.

Tahapan analisis sistem bertujuan untuk memahami kebutuhan serta permasalahan dari sistem.

Permasalahan yang terjadi pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Metrologi Kota Depok belum memiliki sistem untuk menampung semua data perusahaan serta laporan uji kalibrasi dan laporan retribusi. Hal ini juga memberi kesulitan bagi Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag) UPTD Metrologi Kota Depok untuk mengatur jadwal kegiatan serta pengelolaan absensi yang berada di dalam perusahaan karena masih menggunakan media kertas.

Analisis kebutuhan merupakan tahapan pengumpulan kebutuhan dari semua elemen sistem perangkat lunak yang akan di bangun. Berikut merupakan tahapan analisis kebutuhan dalam perancangan Sistem Informasi Kalibrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Metrologi Kota Depok.

Analisis Fungsional adalah jenis kebutuhan yang berisi proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem. Kebutuhan fungsional pada Sistem Informasi UPTD Metrologi Kota Depok adalah sebagai berikut.

Kebutuhan non fungsional berisi tentang karakteristik pengguna yang akan menggunakan sistem. Karakteristik pengguna yang ada saat ini berumur mulai dari 34 tahun hingga 56 tahun. Pengguna terdiri dari Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag), Bendahara, dan Petugas. Pengguna yang ada memiliki pengalaman yang rata-rata hampir sama, yaitu belum terlalu fasih dalam mengoperasikan komputer. Tetapi mereka masih paham dalam pengoperasian sistem operasi *windows*, penggunaan *Microsoft Office Word* dan *Microsoft Office Excel*, serta penggunaan internet. Sistem yang dibangun akan digunakan oleh empat jenis pengguna, yaitu:

Tabel 3.1 Karakteristik Pengguna

Pengguna	Tanggung Jawab	Hak Akses	Tingkat Pendidikan	Tingkat Keterampilan	Pengalaman
Kepala UPTD	Memonitor kinerja para pegawai	Menerima dan melakukan pengecekan laporan pegawai	Minimal SMA/Sederajat	Dapat mengikuti petunjuk pada sistem.	Minimal mampu komputer dan mampu menggunakan browser
Kasubag	Mengelola absensi dan jadwal kegiatan pegawai	Menerima, menghapus, mengedit serta mengelola absensi pegawai	Minimal SMA/Sederajat	Dapat mengikuti petunjuk pada sistem.	Minimal mampu komputer dan mampu menggunakan

		dan jadwal kegiatan pegawai			akan browser
Petugas	Mela kukan kegiatan peng ukuran serta mela porkan hasil kegiatan	Meneri ma jadwal kegiatan dari kasubag dan mem berikan laporan hasil kegiatan.	Minimal SMA/Sederajat	Dapat mengi kuti petunjuk pada sistem.	Minima l mampu komput er dan mampu me nggun akan browser
Bendahara	Meneri ma pem bayaran retribusi serta mela porkan laporan retribusi	Me mberik an laporan pem bayaran retribusi perbulan.	Minimal SMA/Sederajat	Dapat mengi kuti petunjuk pada sistem.	Minima l mampu komput er dan mampu me nggun akan browser

Analisis Kebutuhan Lingkungan akan menjelaskan spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh pengembang serta minimum perangkat yang dapat digunakan oleh pengguna.

Pengguna	Developer
- Hardware	- Hardware

PC	Laptop asus X441N, Processor Intel Celeron CPU N3350 @1.10GHz 1.10GHz, RAM 4 GB DDR3, HDD 500GB
<p>- <i>Software</i></p> <p>Browser (Untuk <i>running</i>)</p>	<p>- <i>Software</i></p> <p>Windows 10</p> <p>Xampp versi 3.2.2</p> <p>Php 5.2.0</p> <p>Html 5</p> <p>Bootstrap v3.3.5</p> <p>Mysql 4.8.4</p>

Analisis kebutuhan data ini bertujuan untuk memudahkan dalam perancangan sistem informasi. Adapun analisis data yang diperlukan yaitu data pegawai, yang meliputi nama, jenis kelamin, nip, tempat lahir, tanggal lahir, nomor telepon dan jabatan. Data pelanggan, yang meliputi nama dan alamat. Serta beberapa data lain seperti contoh absensi yang sedang berjalan, laporan hasil kegiatan dan laporan retribusi setiap bulan.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan serta permasalahan yang telah dijabarkan, maka dapat diberikan solusi dengan Pembuatan Sistem Informasi Kalibrasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Metrologi Kota Depok untuk mempermudah pengelolaan data pegawai beserta absensi pegawai, jadwal kegiatan pegawai, laporan hasil kegiatan dan laporan retribusi.